

BAB V

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa *collaborative governance* dalam pengelolaan Program JakLingko dinilai sudah cukup optimal. Berikut merupakan kesimpulan dari uraian proses *collaborative governance* pada pengelolaan Program JakLingko:

1. Dialog Tatap Muka

Kondisi awal yang dilakukan dalam *collaborative governance* dalam pengelolaan Program JakLingko sudah berjalan cukup baik dengan terpenuhinya seluruh sub aspek yang mendorong terjadinya kondisi awal pada proses kolaborasi. Perubahan nama program yang semula OK-OTRIP menjadi JakLingko dan diperluas cakupannya menjadi sebuah sistem yang mengintegrasikan transportasi publik ditandai sebagai kondisi awal dalam proses kolaborasi pengelolaan Program JakLingko. Namun, yang masih perlu menjadi perhatian adalah kolaborasi juga harus dilakukan dengan pemerintah pusat supaya seluruh transportasi di DKI Jakarta dapat terintegrasi dengan baik tanpa terkecuali, termasuk dengan KRL.

2. Desain Institusional

Desain institusional yang dilakukan dalam *collaborative governance* dalam pengelolaan Program JakLingko telah berjalan sangat baik. Hal ini dikarenakan aturan dasar yang menjadi pedoman dalam proses kolaborasi sudah dijelaskan secara jelas dan transparan dalam PERGUB DKI Jakarta Nomor 68 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem

Transportasi Terpadu Terintegrasi dan PERGUB DKI Jakarta Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penugasan Kepada BUMD untuk menyelenggarakan Sistem Integrasi Pembayaran Antar Moda Transportasi. Dalam PERGUB tersebut juga telah dijelaskan tugas pokok dan fungsi masing-masing *stakeholders* yang terlibat, sehingga semua pihak dapat memahami dengan mudah tugas pokok dan fungsinya.

3. Kepemimpinan Fasilitatif

Kepemimpinan Fasilitatif yang dilakukan dalam *collaborative governance* dalam pengelolaan Program JakLingko sudah dapat dikatakan cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari peran dan komitmen pemimpin dari masing-masing *stakeholders* yang terlibat dalam proses kolaborasi yang dapat menyatukan berbagai perbedaan yang ada untuk mencapai satu tujuan yang sama serta memastikan penyebaran informasi terkait Program JakLingko melalui sosialisasi dan melakukan publikasi pada berbagai *platform* yang dimiliki oleh masing-masing *stakeholder* yang terlibat.

4. Proses Kolaborasi

Proses kolaborasi yang dilakukan dalam *collaborative governance* dalam pengelolaan Program JakLingko sudah berjalan dengan sangat baik. Seluruh tahapan dalam proses kolaborasi tersebut dapat terpenuhi dengan baik, mulai dari dialog tatap muka hingga pencapaian hasil sementara. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa kunci keberhasilan dari proses kolaborasi adalah komunikasi yang baik. Ketika komunikasi yang baik dibangun sejak awal dialog tatap muka, pada akan

mempermudah proses kolaborasi selanjutnya hingga pencapaian hasil sementara.

5.2 Implikasi

Merujuk pada kesimpulan tersebut, maka implikasi yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut:

1. Diperlukan adanya kajian lebih lanjut terkait pemberian subsidi oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap moda transportasi publik. Hal ini harus memperhitungkan tingkat *riderships* dari masing-masing moda transportasi sehingga subsidi yang diberikan tepat sasaran dan tidak menjadi beban tambahan bagi Pemerintah.
2. Diperlukan adanya evaluasi terhadap pelayanan yang diberikan, tidak hanya memperhatikan dari sisi cakupan, akan tetapi juga harus disesuaikan dengan arah tujuan perjalanan pengguna transportasi publik, khususnya TransJakarta.
3. Diperlukan adanya evaluasi secara berkala minimal 3 bulan sekali terkait dengan penerapan Program JakLingko sehingga layanan yang diberikan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.